

**OPTIMALISASI PEMBINAAN VOKASI *BARBERSHOP*  
BERBASIS *OPERATIONAL AND SKILL UPGRADING*  
BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN**

Journal of Correctional Studies  
Vol.3. No. 1 2026  
Politeknik Ilmu  
Pemasyarakatan

Review  
22-06-2026

Accepted

21-07-2026

**Febe Okuli Hia**

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

**M. Romdhon Nurfaidin**

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

**M. Fajar Nurfatah Yasin**

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

**Tri Annis Ayu Septia**

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

**Mitro Subroto**

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan

***Abstract***

*The independence-building program is one of the main pillars of Indonesia's correctional system in preparing inmates for a productive return to society. This article examines the optimization of barbershop vocational training at Class IIB Correctional Institution (Lapas) Tuban, a program that had previously been discontinued due to limited training budgets. Using a descriptive-analytical qualitative approach based on literature review, this article develops an Operational and Skill Upgrading framework as an optimization strategy consisting of two complementary tracks: strengthening operational aspects (partnerships, alternative funding, and facility management) and improving technical competence (certification and service standards). The findings show that barbering skills involve low capital requirements, stable market demand, and a relatively short learning curve, making them highly relevant as post-release capital for inmates' social reintegration. Optimizing this program is projected to contribute to reducing recidivism by opening employment and entrepreneurship opportunities after release. The article recommends a cross-sector partnership scheme among correctional institutions, businesses, and professional certification bodies as a sustainable funding solution for vocational training in Class IIB correctional facilities.*

**Keywords** : *independence guidance, barbershop vocational training, social reintegration, recidivism, correctional institution*

**Abstrak**

Program pembinaan kemandirian merupakan salah satu pilar utama sistem pemasyarakatan Indonesia dalam mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif di tengah masyarakat. Artikel ini mengkaji

optimalisasi pembinaan vokasi bidang *barbershop* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban yang sebelumnya sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran pelatihan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis kajian pustaka, artikel ini merumuskan kerangka Operational and Skill Upgrading sebagai strategi optimalisasi keberlanjutan program melalui dua jalur, yaitu penguatan aspek operasional (kemitraan, diversifikasi pembiayaan, dan tata kelola sarana) serta peningkatan kompetensi teknis (sertifikasi dan standar pelayanan). Hasil kajian menunjukkan bahwa keterampilan *barbershop* memiliki karakteristik modal usaha rendah, permintaan pasar yang stabil, dan siklus pembelajaran yang relatif singkat, sehingga sangat relevan sebagai bekal reintegrasi sosial warga binaan. Optimalisasi program ini diproyeksikan berkontribusi terhadap penurunan tingkat residivisme melalui terbukanya peluang kerja dan wirausaha pascabebas. Artikel merekomendasikan skema kemitraan lintas sektor antara lapas, dunia usaha, dan lembaga sertifikasi profesi sebagai solusi keberlanjutan pembiayaan pembinaan vokasi di Lembaga pemasyarakatan.

**Kata kunci :** pembinaan kemandirian, vokasi *barbershop*, reintegrasi sosial, residivisme, lembaga pemasyarakatan

## Pendahuluan

Sistem pemasyarakatan Indonesia menempatkan pembinaan kemandirian sebagai salah satu pilar utama dalam mempersiapkan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan yang produktif di tengah masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai warga yang produktif dan bertanggung jawab (Zulharman & Ma'ruf, 2023). Ketentuan ini menempatkan pembinaan kemandirian bukan sekadar kegiatan pengisi waktu selama masa pidana, melainkan instrumen strategis untuk memutus mata rantai residivisme. Azka dan Muhammad

(2023) mencatat bahwa jumlah residivis di Indonesia masih signifikan dari total populasi narapidana, sebuah kondisi yang mengindikasikan lemahnya mekanisme rehabilitasi dan minimnya bekal keterampilan yang benar-benar dapat dimanfaatkan warga binaan setelah bebas. Hamzah dan Pemasyarakatan (2020) menambahkan bahwa faktor psikososial, termasuk ketiadaan pekerjaan dan penerimaan sosial, menjadi prediktor kuat terulangnya perilaku kriminal pascabebas. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan kemandirian idealnya diukur bukan dari jumlah kegiatan yang diselenggarakan, melainkan dari sejauh mana keterampilan yang diperoleh warga binaan dapat dikonversi menjadi mata pencaharian yang layak.

Salah satu program pembinaan kemandirian yang dinilai relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini adalah

pelatihan vokasi bidang *barbershop* atau tata rambut. Program ini banyak diselenggarakan di berbagai Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB di Indonesia karena karakteristiknya yang sesuai dengan kondisi warga binaan, yakni membutuhkan modal usaha relatif rendah, jangka waktu pelatihan yang singkat, serta permintaan pasar jasa potong rambut yang relatif stabil di berbagai daerah (Rifky, 2021). Namun, pelaksanaan program vokasi semacam ini kerap dihadapkan pada persoalan klasik, yaitu keterbatasan anggaran operasional pelatihan, yang pada gilirannya menyebabkan program berhenti di tengah jalan sebelum warga binaan benar-benar menguasai keterampilan secara utuh (Zaki & Anwar, 2022). Kondisi serupa juga ditemukan pada pembinaan vokasi *barbershop* di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban, di mana pengadaan pelatihan yang semula berjalan sempat terhenti akibat kendala pembiayaan, sehingga keberlanjutan program pembinaan kemandirian di bidang ini menjadi tidak optimal.

Bertolak dari persoalan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis strategi optimalisasi pembinaan vokasi *barbershop* di Lapas Kelas IIB Tuban melalui kerangka Operational and Skill Upgrading, yakni pendekatan yang memadukan penguatan tata kelola operasional program dengan peningkatan standar kompetensi teknis warga binaan. Artikel ini juga bertujuan mengkaji bagaimana optimalisasi tersebut dapat berkontribusi terhadap upaya reintegrasi sosial warga binaan dan pada akhirnya

meminimalisir angka residivisme melalui pemerolehan pekerjaan atau usaha mandiri pascabebas.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode kajian pustaka (*library research*). Kajian pustaka dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pembinaan kemandirian warga binaan dan pengelolaan program pelatihan keterampilan di lembaga pemasarakatan. Selanjutnya, studi kasus komparatif dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan program pembinaan *barbershop* di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tuban dengan praktik serupa pada beberapa lembaga pemasarakatan sejenis yang telah dipublikasikan dalam literatur. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi, pengelompokan, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta praktik baik (*best practices*) yang dapat mendukung pengembangan program pembinaan kemandirian warga binaan.

### **Pembahasan**

Secara konseptual, pembinaan warga binaan pemasarakatan terbagi ke dalam dua ranah besar, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada penguatan mental, moral, kesadaran hukum, dan keagamaan, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada

pengembangan keterampilan kerja yang dapat menjadi bekal ekonomi warga binaan setelah bebas. Reintegrasi sosial sendiri dipahami sebagai proses pemulihan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat, keluarga, dan lingkungan sosialnya, yang capaiannya sangat ditentukan oleh kesiapan warga binaan secara ekonomi maupun psikologis saat kembali ke masyarakat (Zulharman & Ma'ruf, 2023; Kurniawan, 2023). Kurniawan (2023) menegaskan bahwa reintegrasi sosial tidak dapat berjalan efektif apabila warga binaan tidak memiliki sumber penghidupan yang jelas, karena tekanan ekonomi pascabebas kerap menjadi pemicu utama terulangnya tindak pidana. Dalam konteks ini, pembinaan kemandirian berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan proses pemasyarakatan di dalam lapas dengan kehidupan produktif di luar lapas.

Efektivitas pembinaan kemandirian sangat ditentukan oleh kesesuaian program dengan minat, bakat, dan potensi pasar kerja di sekitar lapas, bukan sekadar keberagaman jenis pelatihan yang ditawarkan. Prinsip ini relevan diterapkan dalam menilai program vokasi *barbershop*, sebab keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, melainkan dari keberlanjutan keterampilan tersebut menjadi mata pencaharian nyata pascabebas.

Di antara berbagai jenis pembinaan kemandirian yang lazim diselenggarakan lapas kelas IIB dan IIA di Indonesia, mulai dari tata boga,

pengelasan, otomotif, hingga pertanian, keterampilan *barbershop* memiliki sejumlah keunggulan komparatif. Pertama, kebutuhan modal usaha relatif kecil dibandingkan vokasi lain seperti otomotif atau pengelasan, karena hanya membutuhkan perangkat dasar seperti gunting, clipper, dan kursi cukur. Kedua, siklus pembelajaran keterampilan dasar relatif singkat sehingga dapat disesuaikan dengan masa pembinaan warga binaan yang bervariasi. Ketiga, permintaan pasar jasa potong rambut cenderung stabil di hampir seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, sehingga peluang kerja maupun usaha mandiri pascabebas relatif terbuka luas (Rifky, 2021).

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa pola ini telah diterapkan di berbagai lapas kelas IIB, seperti Lapas Kelas IIB Purwodadi yang menggandeng mitra usaha *barbershop* profesional untuk melatih warga binaan mulai dari teknik dasar potong rambut hingga etika pelayanan pelanggan (Ditjenpas, 2025), serta Lapas Kelas IIB Singkawang yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan nonformal setempat (Kompasiana, 2024). Pola kemitraan semacam ini memperlihatkan bahwa keberlangsungan pelatihan *barbershop* sangat bergantung pada dukungan pihak eksternal, terutama ketika anggaran internal lapas terbatas. Dengan demikian, ketiadaan skema kemitraan yang terstruktur menjadi salah satu akar persoalan ketika pengadaan pelatihan *barbershop* di suatu lapas terhenti akibat kendala biaya, sebagaimana terjadi pada Lapas Kelas IIB Tuban.

Persoalan keterbatasan anggaran operasional dalam pembinaan kemandirian bukan fenomena baru maupun eksklusif dialami satu lapas. Zaki dan Anwar (2022) dalam kajiannya di Rumah Tahanan Kelas IIB Kebumen menemukan bahwa efektivitas pembinaan keterampilan kerja sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, bahan baku pelatihan, serta instruktur yang kompeten. Ketika salah satu komponen tersebut tidak terpenuhi secara berkelanjutan, program pembinaan cenderung berjalan secara sporadis, yaitu terselenggara pada periode tertentu kemudian terhenti tanpa keberlanjutan yang jelas.

Kondisi ini pula yang teridentifikasi pada pelaksanaan pembinaan vokasi *barbershop* di Lapas Kelas IIB Tuban. Program yang semula telah berjalan dan diminati warga binaan mengalami stagnasi karena pengadaan sarana pelatihan lanjutan, seperti penambahan unit alat cukur, bahan habis pakai, maupun honor instruktur, tidak dapat dipenuhi secara berkelanjutan oleh anggaran rutin lapas. Implikasinya, warga binaan yang telah mengikuti pelatihan dasar tidak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan level keterampilannya (*skill upgrading*), sementara dari sisi kelembagaan, sarana *barbershop* yang telah tersedia belum dikelola secara optimal sebagai unit kegiatan produktif di dalam lapas (*operational upgrading*).

Persoalan ini menegaskan bahwa keberlanjutan pembinaan kemandirian tidak dapat semata-mata bertumpu pada

anggaran negara, melainkan memerlukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui kemitraan lintas sektor. Tanpa strategi tersebut, program pembinaan berisiko berulang mengalami pola yang sama, yaitu dimulai dengan antusiasme tinggi namun terhenti sebelum mencapai dampak optimal terhadap kesiapan kerja warga binaan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, artikel ini merumuskan kerangka *Operational and Skill Upgrading* sebagai strategi optimalisasi pembinaan vokasi *barbershop*. Kerangka ini terdiri atas dua dimensi yang saling melengkapi.

Dimensi pertama, *operational upgrading*, berfokus pada penguatan tata kelola pelaksanaan program melalui: (a) pembentukan kemitraan dengan pelaku usaha *barbershop* profesional untuk dukungan peralatan dan instruktur, sebagaimana dipraktikkan Lapas Kelas IIB Purwodadi bersama mitra usaha swasta (Ditjenpas, 2025); (b) penggandengan lembaga filantropi maupun lembaga pelatihan kerja daerah untuk pembiayaan bersama, seperti kolaborasi Lapas Kelas IIB Bangko dengan lembaga amal zakat dan balai latihan kerja setempat (Berita Merdeka Online, 2026); dan (c) pengelolaan unit *barbershop* di dalam lapas sebagai sarana asimilasi yang benar-benar melayani warga binaan maupun petugas, sehingga sarana yang telah diadakan memberikan nilai tambah berkelanjutan, sebagaimana dilakukan Rumah Tahanan Tanjungpinang (Berita Tanjungpinang, 2025).

Dimensi kedua, *skill upgrading*, berfokus pada peningkatan standar

kompetensi teknis warga binaan melalui uji kompetensi dan sertifikasi profesi. Praktik ini telah diterapkan Lapas Kelas IIA Kediri yang menindaklanjuti pelatihan dasar dengan uji kompetensi bersama Lembaga Sertifikasi Profesi bidang tata rias, sehingga warga binaan memperoleh sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional sebagai modal kerja maupun wirausaha pascabebas (Bangsaonline, 2026). Sertifikasi semacam ini penting karena memberikan legitimasi keterampilan warga binaan di hadapan calon pemberi kerja maupun pelanggan usaha mandiri, sekaligus menjawab keraguan sebagian masyarakat terhadap kompetensi mantan warga binaan.

Bagi Lapas Kelas IIB Tuban, penerapan pola kemitraan dengan pelaku usaha *barbershop* lokal untuk dukungan sarana, serta penjajakan kerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi bidang tata rias, dapat menjadi solusi jangka menengah untuk mengatasi kendala pembiayaan yang selama ini menghambat keberlanjutan program.

Untuk saat ini untuk menindaklanjuti kendala yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan program pembinaan ini, taruna politeknik imigrasi dan pemasyarakatan menginisiasi kegiatan Optimalisasi pembinaan vokasi *barbershop* melalui kerangka Operational and Skill Upgrading di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Hal ini juga menjadi dasar atau bahan percontohan untuk kedepannya pentingnya kegiatan program pembinaan di bidang lain bisa terlaksana di lapas.



*Gambar 1. Pelaksanaan Skill Upgrading warga binaan LAPAS Kelas IIB Tuban*



*Gambar 2. Hasil Upgrading Operational Ruangan Giatja Barbershop LAPAS Kelas IIB Tuban*

Optimalisasi pembinaan vokasi *barbershop* melalui kerangka Operational and Skill Upgrading pada akhirnya diarahkan untuk mendukung dua tujuan besar, yaitu keberhasilan reintegrasi sosial dan penurunan angka residivisme. Anjani dan Wibowo (2023) menegaskan bahwa pemberdayaan narapidana melalui pembinaan kemandirian yang terarah mampu memutus lingkaran residivisme karena warga binaan memiliki alternatif penghidupan yang sah setelah bebas, alih-alih kembali pada pola perilaku lama akibat tekanan ekonomi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Tuta, Ismail, dan Moha (2024) yang menunjukkan bahwa program pembinaan yang berorientasi pada kesiapan kerja nyata berkontribusi

menekan kecenderungan warga binaan kasus tertentu untuk mengulangi tindak pidana.

Namun demikian, optimalisasi program tidak cukup berhenti pada tahap pelaksanaan pelatihan. Diperlukan pula sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan keterampilan yang diperoleh benar-benar termanfaatkan pascabebas. Karisadini (2025) merekomendasikan penggunaan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas program pembinaan kemandirian secara menyeluruh, mulai dari kesesuaian konteks kebutuhan warga binaan hingga dampak produk berupa penyerapan kerja pascabebas. Pendekatan serupa dapat diadaptasi Lapas Kelas IIB Tuban dengan menambahkan basis data sederhana untuk melacak status pekerjaan alumni pelatihan *barbershop*, sebagaimana disarankan Darmawati (2022) dalam pembaharuan model penilaian pembinaan berbasis teknologi.

Dengan demikian, optimalisasi pembinaan vokasi *barbershop* bukan sekadar upaya menghidupkan kembali program yang sempat terhenti, melainkan momentum untuk membangun sistem pembinaan kemandirian yang lebih tangguh terhadap keterbatasan anggaran, terukur capaiannya, dan berorientasi jangka panjang pada penurunan residivisme melalui pemerolehan pekerjaan maupun usaha mandiri warga binaan setelah bebas.

## Kesimpulan

Pembinaan vokasi *barbershop* di Lapas Kelas IIB Tuban merupakan salah satu program pembinaan kemandirian yang strategis bagi upaya reintegrasi sosial warga binaan, mengingat karakteristik keterampilan ini yang membutuhkan modal usaha rendah, waktu pelatihan relatif singkat, dan permintaan pasar yang stabil. Namun, keberlanjutan program ini sempat terhambat oleh keterbatasan pembiayaan pelatihan, sebuah persoalan yang juga lazim dihadapi lapas kelas IIB lain di Indonesia. Kerangka Operational and Skill Upgrading yang dirumuskan dalam artikel ini menawarkan dua jalur optimalisasi yang saling melengkapi, yaitu penguatan tata kelola operasional melalui kemitraan lintas sektor dan peningkatan standar kompetensi teknis melalui sertifikasi profesi. Penerapan kedua jalur ini diproyeksikan dapat mengatasi ketergantungan program pada anggaran rutin lapas sekaligus meningkatkan nilai jual keterampilan warga binaan di pasar kerja, sehingga pada gilirannya berkontribusi terhadap penurunan angka residivisme.

## Referensi

- Anjani, R. M., & Wibowo, P. (2023). Mengatasi lingkaran residivisme: Pemberdayaan narapidana melalui pembinaan kemandirian di lembaga pemasyarakatan. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Azka, M. A., & Muhammad, A. (2023). Residivisme dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).

- Bangsaonline.com. (2026, 23 Juni). 20 warga binaan Lapas Kediri ikuti uji kompetensi *barbershop*. <https://bangsaonline.com>
- Berita Merdeka Online. (2026). Warga binaan Lapas Bangko lulus pelatihan bersertifikat pangkas rambut dan tambal ban, bekal kemandirian usai bebas. <https://www.beritamerdekaonline.com>
- Berita Tanjungpinang. (2025, 23 Juli). Rutan Tanjungpinang latih narapidana keterampilan *barbershop*. <https://beritanjungpinang.com>
- Darmawati, D. (2022). Pembaharuan model penilaian pembinaan narapidana residivis berbasis teknologi. *Al-Adalah*, 7, 75–92.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025, 23 Juli). Lapas Purwodadi gandeng Dims *Barbershop* latih keterampilan warga binaan. <https://www.ditjenpas.go.id>
- Hamzah, I., & Pemasyarakatan, P. I. (2020). Faktor-faktor psikososial prediktor residivis. *Psikologi Penjara: Penerapan Psikologi dalam Proses Pemasyarakatan*, 15.
- Karisadini. (2025). Evaluasi program pembinaan kemandirian di Lapas Perempuan Tangerang menggunakan model CIPP.
- Kompasiana.com. (2024, 28 September). Narapidana Lapas Singkawang dibekali pelatihan *barbershop*. <https://www.kompasiana.com>
- Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana terorisme. *Gema Keadilan*, 10(1), 1–11.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Rifky, M. (2021). Implementasi pembinaan kemandirian sebagai peluang warga binaan pemasyarakatan menjadi wirausahawan.
- Tuta, R., Ismail, D. E., & Moha, M. R. (2024). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba (Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo).
- Zaki, M. G. S., & Anwar, U. (2022). Pembinaan kemandirian melalui keterampilan kerja dalam upaya meningkatkan keahlian sebagai bekal narapidana kembali ke masyarakat (Studi pada Rutan Kelas IIB Kebumen).
- Zulharman, & Ma'ruf, A. (2023). Reintegrasi sosial bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone. *Jurnal Darussalam*, 3(1), 1–20.